

PROPOSAL PENELITIAN

REVITALISASI
**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KB DI JAWA TIMUR**

**KAJIAN TRANSFORMASI UU NOMOR 52 TAHUN 2009
MELALUI KONEKSITAS ANTAR 'STAKE HOLDER' (MODAL SOSIAL)
MENUJU KELUARGA SEJAHTERA DI PROVINSI JAWA TIMUR**

**TIM PENELITI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

KERJA SAMA

**KOALISI INDONESIA
UNTUK KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN

**PERWAKILAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR
2012**

Dengan hormat,

Kami tim peneliti Kajian Revitalisasi Program Pengendalian Penduduk Dan KB di Jawa Timur, mengharapkan dapat tambahan substansi dan referensi dari Ibu/Bapak guna penyempurnaan proposal kajian. Atas kesediaan Ibu/Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih dan atas segala kekurangannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya.

*Hormat kami,
Tim Peneliti*

E-mail: adambagyo@yahoo.co.id
Hmadib2011@gmail.com

1. Isu-isu masalah kependudukan yang mencakup keseluruhan program prioritas, program intervensi dan rencana aksi, telah tertuang dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Bagaimana menurut Ibu/Bapak peran strategis UU tersebut dalam Revitalisasi Program Pengendalian Penduduk dan KB di Provinsi Jawa Timur?
2. Kebijakan dalam mengatasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing (Pasal 8, UU Nomor 52 Tahun 2009).
Bagaimana prospek Revitalisasi Program Pengendalian Penduduk dan KB di Jawa Timur, dalam menghadapi respons yang berbeda-beda dari pemerintah kabupaten/kota?
3. Transformasi pengetahuan, sikap dan rencana aksi terhadap UU Nomor 52 Tahun 2009 perlu terus dilakukan—melalui media tertentu—antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dengan leader anggota legislatif. Tindakan ini perlu, yang merupakan penguatan terhadap komitmen Revitalisasi Program Pengendalian Penduduk dan KB di Provinsi Jawa Timur. Bagaimana usulan konstruktif Ibu/Bapak?
4. Untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat—melalui Revitalisasi Program Pengendalian Penduduk dan KB—diperlukan 'modal sosial' yang merupakan manifestasi koneksitas antar 'stake holder' di Provinsi Jawa Timur. Bagaimana usulan konstruktif Ibu/Bapak?